24

Masukan Terhadap :

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEHUTANAN TAHAP KEDUA

Dudung Darusman

Disampaikan pada Lokakarya Perencanaan Hutan di Bogor, 25 Mei 1992

Dalam sistim perencanaan yang dianut di negera kita, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan yang terpanjang dan terluas horizonnya. Oleh karena itu dalam RPJP harus terasa jelas adanya kepanjangan dan keluasan horizon tersebut beserta batas-batasnya. Dalam RPJP semua kegiatan atau langkah pembangunan dari rencana yang lebih rinci harus ditempatkan sehingga dapat dilihat secara jelas dan mudah posisi dan peranannya dalam konteks keseluruhan.

Semua sumberdaya alam yang ada di muka bumi ini pada dasarnya atau pada akhirnya adalah untuk kepentingan atau kebutuhan manusia, yang tentu saja dalam rangka mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengapa harus diurus, karena sumberdaya alam tersebut terbatas. Disitulah peranan manusia diperlukan, sejak dari perencanaan sampai dengan pengendaliannya, agar proses pemanfaatannya efisien. Jadi, pangkal dari segala kegiatan pengelolaan/pengurusan sumberdaya alam, termasuk hutan, adalah permasalahlan pemenuhan kebutuhan manusia akan manfaat-manfaat hutan yang keadaannya terbatas. Dengan kata lain, semua itu dalam kerangka permasalahan *demand* dan *supply*. Sengaja disebut *demand* terdahulu karena segala aktivitas manusia dimulai dari adanya kebutuhan, atau dalam bahasa bisnis : *karena ada pasar maka produksi dapat berjalan*.

Dalam RPJP, sebagai suatu gambaran horizon pemanfaatan sumberdaya hutan, hendaknya kita dapat mengemukakan terlebih dahulu tentang cita-cita atau kebijaksanaan (*policy*) umum/dasar yang akan dipegang oleh Bangsa Indonesia terhadap keberadaan hutannya, yakni sejauhmana harapan-harapan Bangsa Indonesia terhadap sumberdaya hutan dalam rangka mensejahterakan (mengusahakan dan mengkonsumsi berbagai bentuk hasil hutan) masyarakatnya. Setelah itu perlu dikemukakan tentang kondisi dari *demand*, yang akan memberi tuntutan atau tekanan permintaan. Kemudian tentu saja kita kemukakan sejauhmana kemampuan *supply* dari sumberdaya hutan yang kita miliki. Bahkan kita harus mengemukakan atau mengenal pula kondisi sumberdaya manusianya.

Setelah kita memiliki cita-cita atau kebijaksanaan dasar terhadap keberadaan sumberdaya hutan, maka kita rumuskan bagaimana memadukan kondisi-kondisi *demand, supply* dan sumberdaya manusia tersebut agar serasi dan efisien dalam mencapai cita-cita Bangsa Indonesia tersebut. Tentu saja sambil berjalan, artinya secara dinamik, kita dapat dan harus mengupayakan pula agar kondisi-kondisi yang ada, baik sisi *demand, supply* maupun sumberdaya manusianya, dapat diperbaiki sehingga cita-cita tersebut dapat dipenuhi secara efisien dan semaksimal mungkin. Semua ini akan menjadi arahan terhadap apa-apa yang secara strategis akan dilaksanakan atau dirumuskan dalam rencana-rencana pembangunan dengan jangka yang lebih pendek.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, saya akan menyampaikan kerangka dan isi pokok yang hendaknya dapat dikandung dalam RPJP Kehutanan. Ini betul-betul saran yang tidak dimaksudkan mengurangi arti yang telah dibuat. Bahkan saya menyadari bahwa yang telah dibuat dalam naskah awal itu sendiri telah sangat lengkap butir-butirnya, hanya saja belum tergambar dengan jelas posisi dan peranannya dalam horizon yang lebih luas seperti yang dimaksudkan di atas.

I. KEBIJAKSANAAN DASAR

Kebijaksanaan dasar ini adalah dasar bagi segala penelaahan, pemahaman dan perumusan segala tindakan. Misalnya disini perlu dikemukakan : kebijaksanaan kehutanan yang efisien dan memberi manfaat ganda yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Bangsa Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Lebih lanjut dapat dikemukakan, misalnya, dua hal berikut :

1. Kehutanan dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yang sangat dimungkinkan dari kondisi-kondisi sumberdaya alamnya, maupun dari sifat-sifat aktivitas ekonomi pemanfaatannya, yang pengaruhnya terhadap sektor-sektor lain, baik langsung maupun tidak langsung, adalah sangat besar.
2. Kehutanan merupakan alat/instrumen strategis dalam percaturan persaingan dan juga kerjasama dengan negara-negara lain dalam menghadapi globalisasi ekonomi khususnya dan budaya pada umumnya. Di sini perlu dikemukakan alasan-alasan, baik yang bersifat emosional maupun rasional, disertai fakta-fakta yang mendukungnya.

Tentu saja dapat ditambahkan lebih lanjut, apa-apa lagi yang kiranya menjadi harapan atau cita-cita Bangsa Indonesia terhadap keberadaan sumberdaya hutan yang dimilikinya.

II. KONDISI DEMAND

Dalam bagian ini perlu dikemukakan secara garis besarnya, misalnya tentang hal-hal sebagai berikut.

1. Jenis-jenis dan jumlah manfaat atau hasil hutan yang diperlukan masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, baik sekarang maupun *trend*-nya dimasa yang akan datang.
2. Kecenderungan pola kebutuhan dan konsumsi masyarakat dengan memperhatikan kecenderungan pertambahan dan perubahan struktur penduduk, pendapatan perkapita dll.

3. Kondisi dan perkembangan regional dan internasional yang mempengaruhi *net-demand* terhadap manfaat dan hasil hutan Indonesia, seperti misalnya : kondisi dinamik di Pacific-Rim yang ditandai dengan munculnya negara-negara macan Asia, ASEAN, NAFTA, menguatnya kesatuan MEE dan lain-lain. Bahkan munculnya kekuatan ekonomi kehutanan Rusia Timur/Siberia, Australia dan New Zealand yang mungkin disusul Chili dan lain-lain.

4. Kondisi dan perkembangan peranan NGO's, terhadap pola konsumsi masyarakat dan pola produksi di dunia, dst., dst.

Dari uraian pada bagian ini harus dapat disimpulkan sesara garis besar tentang jenis dan jumlah *demand* serta *political pressures* yang akan menentukan arah *demand* yang akan diambil/dilayani. Tentu saja pada kenyataannya, yang lebih penting lagi adalah arahan upaya-upaya yang dapat mempengaruhi kondisi *demand* tersebut, agar kondisinya lebih sesuai dan menguntungkan.

III. KONDISI SUPPLY

Dalam bagian ini, di samping dikemukakan "kekayaan sumberdaya hutan" yang kita miliki, juga yang lebih penting tentang efisiensi produksi yang dicapai selama ini. Efisiensi yang dimaksud adalah efisiensi dari semua tahap produksi, sejak pemanfaatan/pengambilan ekosistem hutan, terus sampai proses industri yang paling hilir, sebelum dikonsumsi. Secara singkat dapat ditunjukkan sebagai berikut.

EFISIENSI EKONOMI PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM

$$\frac{\textit{Net artifact service}}{\textit{Eco-service sacrificed}} = \underbrace{\frac{\textit{Eco-stock sacrificed}}{\textit{Eco-service sacrificed}}}_{\textit{Eco-service efficiency}} \times \underbrace{\frac{\textit{Thruput}}{\textit{Eco-stock sacrificed}}}_{\textit{Eco-maintenance efficiency}} \times \underbrace{\frac{\textit{Artifact stock}}{\textit{Thruput}}}_{\textit{Artifact maintenance efficiency}} \times \underbrace{\frac{\textit{Net artifact service}}{\textit{Artifact stock}}}_{\textit{Artifact service efficiency}}$$

Dalam hal kondisi *supply* ini, misalnya perlu dikemukakan hal-hal berikut.

1. Faktor-faktor dan atau *policy* apa saja yang selama ini berpengaruh terhadap keadaan efisiensi dari setiap tahap produksi kehutanan, serta *policy* dan tindakan apa yang perlu diambil selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi itu.

2. Perlu ditunjukkan secara jelas *policy* atau tindakan yang berada dalam sektor kehutanan dan luar kehutanan, seperti misalnya : Deptrans, Deptan, Depperdag, Depkeu dsb., sehingga jelas tanggung jawab masing-masing.

3. Strategi pengelolaan umum sumberdaya hutan, misalnya kedudukan hutan produksi tanaman dan hutan produksi alam, pemanfaatan hutan lindung, hutan suaka alam dan hutan wisata. Perlu ditunjukkan potensi-potensi manfaat yang belum tergali dan dapat diusahakan, yang terdapat pada semua fungsi hutan tersebut.

Dari uraian bagian ini harus dapat ditunjukkan upaya-upaya pengembangan produksi beserta peningkatan efisiensinya, yang dapat melayani kebutuhan *demand*, serta memenuhi cita-cita/harapan Bangsa Indonesia dari keberadaan sumberdaya hutannya seperti telah dikemukakan di atas.

IV. KONDISI SUMBERDAYA MANUSIA

Dalam bagian ini perlu dikemukakan kondisi sumberdaya manusia kehutanan Indonesia, baik bagi orang per orang maupun sistem pengorganisasian pekerjaannya. Misalnya, perlu dikemukakan dalam hal-hal sebagai berikut.

1. Kapasitas dan kapabilitasnya, yang terkait dengan tingkat ketersediaan, tingkat pendidikan dan latihan serta pengalamannya. Bagaimana kondisi yang ada dan sampai sejauh mana perlu dan dapat ditingkatkan.
2. Etika kerjanya, yang terkait dengan budaya, sistim insentif-disinsentif, termasuk penjenjangan karier, dsb. Bagaimana kondisi dan upaya peyempurnaannya.
3. Wawasan jangka panjang dan wawasan kebangsaan/multisektoral-nya, yang ditunjukkan oleh realisasi "*calculus of concent*-nya", dst., dst.

Dari uraian pada bagian ini harus dapat dikemukakan arah pengembangan sumberdaya manusia kehutanan Indonesia, yang dapat menunjang efisiensi pencapaian cita-cita Bangsa Indonesia seperti diuraikan di atas.

Demikianlah kiranya, yang dapat saya sampaikan sebagai komentar terhadap naskah awal dari RPJP Kehutanan Tahap Kedua, yang lebih menyoroti segi kerangka pemikiran dan penyajiannya. Semua butir-butir yang telah ada pada naskah awal tersebut, kiranya dapat ditata dalam kerangka yang saya sarankan tersebut di atas.

Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.